

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman ini dunia bisnis berkembang dengan begitu pesat. Perkembangan bisnis memberikan dampak positif dan negatif pada beberapa aspek, meliputi aspek ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya. Salah satu dampak ekonominya yaitu semakin meningkatnya persaingan antar perusahaan untuk mengembangkan bisnis dan menguasai pasar. Pengelolaan perusahaan yang baik membawa perusahaan dapat melewati persaingan antar perusahaan ini. Namun, saat ini perusahaan yang baik tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba tetapi juga dituntut dalam perhatiannya terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan tersebut dikarenakan dalam operasional perusahaan kerap sekali berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan masyarakat.

Melihat dari tuntutan itu timbulah program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu komitmen implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dapat dipenuhi secara proporsional (Suryaningsum et al, 2016). Komitmen ini juga diperkuat oleh kepentingan Perseroan untuk memenuhi ketentuan yang termasuk dalam UU No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas. Sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab, Perseroan senantiasa mengkaji dampak yang mungkin

ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan hidup, sosial maupun perekonomian masyarakat. Tanggung jawab sosial baik dilakukan oleh sebuah perusahaan guna menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat dan investor khususnya. Kegiatan-kegiatan ini pastinya akan berdampak kepada perusahaan baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang.

Forum for Corporate Governance in Indonesian (FCGI) menyatakan GCG sebagai peraturan atau sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan tersebut (Ramdhaningsih & Utama, 2013). Menurut Ramdhaningsih dan Utama (2013) Ketika perusahaan memiliki pengelolaan yang baik dan transparan dapat diartikan bahwa perusahaan itu sudah menerapkan konsep GCG dengan baik. Pengimplikasian GCG ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, tidak hanya bagi manajemen dan karyawan perusahaan saja melainkan bagi pihak lain seperti bagi pemasok, konsumen, pemerintah dan *stake holder*. Menurut pedoman yang di terbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bahwa GCG memiliki 5 prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), transparansi (*transparency*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Perkembangan saat ini khususnya di Indonesia, *Good Corporate Governance* (GCG) sudah menjadi isu yang global. Pelaksanaan GCG diperlukan agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dengan

memikirkan etika yang berlaku juga menjaga kelangsungan bisnis dari perusahaan itu sendiri. Bentuk dari pengimplementasian GCG itu sendiri adalah dengan melakukan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bila dikaitkan dengan GCG, pelaksanaan CSR ini merupakan salah satu pewujudan dari prinsi GCG yaitu prinsip responsibility, diketahui dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2 bagian C dan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 68 bagian A yang menyatakan bahwa pelaksanaan CSR bersifat wajib dan mewajibkan pengungkapan pelaksanaan CSR. Jika perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka selain mengejar keuntungan perusahaan juga harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan saham publik, kepemilikan saham asing, ukuran dewan komisaris, komite audit, komisaris independen dan sebagainya (Pasaribu et al., 2015). Dalam penelitian ini menitik beratkan pada kepemilikan perusahaan, ukuran dewan direksi dan komite audit sehingga pencerminan dari mekanisme GCG yang diambil adalah kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan komite audit.

Struktur kepemilikan merupakan faktor yang banyak diteliti sebagai salah satu praktek GCG yang mempengaruhi CSR karena struktur kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan

efektifitas monitoring (Hutapea & Malau, 2018). Fokus pada kepemilikan institusional yang dapat diketahui dari besarnya kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal (Dewi & Sanica, 2017). Dalam penelitian Nugroho dan Yulianto (2015) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Alasan yang dapat menjelaskan penelitian itu adalah institusi seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait CSR yang mengawasi manajemen perusahaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat.

Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberikan saran-saran kepada direksi dalam mengelola perusahaan (Nugroho & Yulianto, 2015). Hutapea dan Malau (2018) berpendapat bahwa jika semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan manajemen akan lebih luas. Ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR begitu hasil penelitian (Yusran, Kristanti, & Aminah, 2018), (Pasaribu et al., 2015) dan (Hutapea & Malau, 2018). Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar pengungkapan informasi CSR lebih transparan.

Komite audit merupakan bagian dari perusahaan yang dibentuk guna membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya (Nugroho & Yulianto, 2015). Berdasarkan strukturnya, komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota, salah satunya dari anggota tersebut merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen (SE Ketua Bapepam Nomor SE-03/PM/2000) dalam (Nurfadilah & Sagara, 2015). Hasil penelitian Nurfadilah dan Sagara (2015) menyatakan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan aktivitas tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholder* dengan cara memberi perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungannya (Nugroho & Yulianto, 2015). Dampak negatif dari aktivitas bisnis perusahaan menimbulkan tekanan untuk perusahaan untuk melakukan sebuah tanggung jawab terhadap lingkungan yang terkena dampak. Pengungkapan CSR dianggap penting agar perusahaan tidak diklaim lepas dari tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan. Implementasi dari prinsip *transparancy* membuat masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai perusahaan terkait. Pengungkapan CSR sendiri bisa dijadikan sebuah bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap publik.

CSR diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan perusahaan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan melakukan CSR

dengan tujuan agar keberlangsungan hidup dari perusahaan terjaga serta dan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang harus selaras dengan keadilan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan sekitar operasi perusahaan. Pada era informasi dan teknologi serta desakan globalisasi, tuntutan menjalankan CSR semakin besar. Oleh karena itu, dalam praktiknya penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat.

Di dunia internasional ada organisasi yang mempunyai tujuan untuk memantau dan membantu perusahaan berperilaku sosial dan bertanggung jawab. Organisasi ini muncul dikarenakan adanya kegelisahan antara hubungan bisnis dengan masyarakat. Menurut Habbash (2016) contoh dari organisasi tersebut ialah *Business in the Community* (BiTC) di UK, *African Institute of Corporate Citizenship* (AICC), *Business for Social Responsibility* (BSR) di USA dan *International for Standarization* (ISO).

Di Indonesia wacana mengenai CSR mengemuka pada tahun 2001, namun sebelum wacana ini mengemuka sudah ada beberapa perusahaan yang sudah melaksanakan CSR walaupun masih sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam laporan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep yang dapat membawa perusahaan agar melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dampak negatif yang banyak ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan membawa CSR ini muncul pada beberapa perusahaan. Dampak negatif yang di timbulkan oleh perusahaan umumnya dirasakan oleh masyarakat sekitar yang berada di dekat lokasi perusahaan.

Perusahaan tambang yang cenderung bersinggungan langsung dengan alam menjadi sebuah polemik yang menarik dalam pembahasannya dengan konsep tanggung jawab sosial (Nahar, 2014). Maraknya kasus yang terkait dengan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti kasus Lapindo yang dinobatkan sebagai kasus perusahaan paling tidak bertanggung jawab sosial, kasus pencemaran teluk buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya serta kasus PT Freeport yang dinilai tidak memenuhi batas air limbah dan telah mencemari air laut dan biota laut dan masih banyaknya kasus-kasus lain (Nurfadilah & Sagara, 2015). Melihat dari banyaknya kasus bisa disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan masih rendah dan masih banyaknya tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu membawa penulis untuk meneliti ulang tentang mekanisme GCG terhadap pengungkapan CSR di Indonesia dengan berfokus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah Kepemilikan Istitusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
2. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

3. Apakah Proporsi Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Istitusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Mengetahui pengaruh proporsi Komite Audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan lebih luas mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan informasi, evaluasi dan pertimbangan untuk menerapkan konsep GCG dan melakukan CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku dan etika bisnis yang ada.

b. Bagi Peneliti

Menjadi media untuk mengembangkan wawasan yang dimiliki melalui penerapan teori yang diperoleh saat perkuliahan dengan praktek nyata.

c. Bagi Universitas

Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema maupun pembahasan yang relevan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini berguna untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur penulisan skripsi ini. Secara umum sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi berupa uraian singkat

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi mengenai teori-teori yang diambil dari jurnal, kutipan buku, serta beberapa *literature review* yang

berkaitan dengan materi penyusunan laporan penelitian skripsi, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis dalam laporan penelitian skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian akan membahas mengenai desain dari penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data yang diperoleh, pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan akan membahas mengenai analisis yang dilakukan penulis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis data yang telah ditentukan di bab tiga. Pengujian hasil penelitian antara lain memuat pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* yang di proksikan pada Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komite Audit terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.